

AUDIT UNTUK PERUSAHAAN KECIL

Dul Muid

Abstract

The obligations placed upon the auditor by the companies acts have universal application, and the same requirements for the audit of annual financial statement apply to all companies irrespective of their size. However, in practice, there may be many different between the audits of large and small companies. In general, the audit of small companies bear very little resemblance in scope, conduct and purpose to the audit of their large counterpart, other than in the production of an audit report which refers to the same legal requirements.

Arising out of general concern about the legislative burden placed upon small companies, the need for the publication of a full set of annual financial statements has been questioned. Linked to this discussion is the issue of what is the purpose of the audit of small companies, where, in many cases, the managers and shareholders are the same small group of individual

So, for reasons to do with both the usefulness and the practice of auditing, the nature of the audit of small companies requires assessment.

Keywords : Auditor, Audit, Small companies

Pendahuluan

Pengusaha kecil memandang akuntansi sebagai sesuatu yang sangat sulit dijangkau, mereka kurang begitu memperhatikan proses akuntansi. Hal penting bagi mereka adalah bagaimana cara menghasilkan laba sebanyak mungkin dari usaha yang dijalankan tanpa diganggu dengan masalah pembukuan. Pemikiran para pengusaha ini sebenarnya tidak salah namun tidak tepat digunakan dalam mengelola suatu usaha yang diharapkan akan menjadi besar pola pikiran seperti ini dapat menyebabkan kegiatan usaha menjadi tidak berkembang.

Ketidakteraturan pembukuan dan lemahnya system pengendalian intern merupakan permasalahan utama yang sering dihadapi oleh pengusaha kecil, begitu pula dengan para akuntan public yang melakukan kegiatan profesi pada sector usaha kecil. Setelah beberapa decade diabaikan, audit bisnis mendapatkan perhatian dari para ahli di Amerika Serikat. Dengan kondisi ketidakjelasan pembukuan dan pengawasan pada kegiatan usaha kecil dan untuk mengantisipasi kondisi tersebut maka organisasi profesi diharapkan menyusun standar profesi guna pemeriksaan bisnis kecil.

Penerapan standar auditing pada bisnis kecil membuktikan adanya kesulitan bagi banyak akuntan public khususnya aspek independensi dan pengendalian intern. Audit bisnis

kecil menunjukkan tantangan yang unik bagi praktisi sehubungan dengan standar independensi dan studi evaluasi pengendalian intern.

Pengertian dan Karakteristik Usaha Kecil

Pengertian Usaha Kecil

Ada dua pendekatan yang dapat digunakan untuk mendefinisikan usaha kecil yaitu pendekatan kualitatif dan kumulatif (Carsberg, et Al. 1985). Dengan menggunakan pendekatan kualitatif, definisi usaha kecil didasarkan dari sifat dasar dasar propietorial-nya, kurangnya pengawasan internal, gaya manajemen dan ketergantungan terhadap akuntan profesional.

Berdasarkan pendekatan kuantitatif itu, dalam bab 8 Company act 1981 di Inggris, dikategorikan usaha kecil bila memenuhi 1) Asset total tidak lebih 700.000; 2) Turnover tidak lebih dari 1.400.000; 3) Jumlah tenaga kerja tidak lebih dari 50 karyawan. Tampaknya definisi kuantitatif ini lebih bisa diterima berdasarkan fakta bahwa auditor banyak menggunakan turnover dan sejumlah karyawan sebagai dasar mendefinisikan usaha kecil (Caraberg, 1985).

Di Indonesia pengertian usaha kecil masih sangat beragam. Sebelum dikeluarkan UU No. 9/1995, setidaknya terdapat lima Instansi yang merumuskan usaha kecil antara lain: Biro Pusat Statistik (BPS), Departemen Perindustrian, Bank Indonesia, Departemen Perdagangan, Kamar Dagang Dan Industri. Kelima instansi ini kecuali BPS, usaha kecil pada umumnya dirumuskan dengan pendekatan financial.

Departemen perindustrian dan bank Indonesia misalnya, mendefinisikan usaha kecil berdasarkan asetnya. Menurut dua instansi ini, yang dimaksud dengan usaha kecil adalah usaha yang asetnya (tidak termasuk tanah dan bangunan), bernilai kurang dari 600 juta. Departemen perdagangan membatasi usaha kecil berdasarkan modal kerjanya. Menurut departemen perdagangan, usaha kecil adalah usaha (dagang) yang modal kerjanya kurang dari Rp 25 juta

Sedangkan kadin terlebih dahulu membedakan usaha kecil menjadi dua kelompok. Pertama adalah bergerak dalam bidang perdagangan, pertanian dan industri. Kedua, adalah yang bergerak dalam bidang konstruksi. Menurut kadin yang dimaksud dengan kelompok pertama adalah yang memiliki modal kerja kurang dari Rp 150 juta dan memiliki nilai usaha kurang dari Rp 600 juta. Adapun yang kelompok kedua, yang dimaksud dengan usaha kecil adalah yang memiliki modal kerja kurang dari Rp 250 juta dan memiliki nilai kerja kurang dari Rp 1 milyar.

Berbeda dari keempat instansi diatas adalah batasan usaha kecil yang dikemukakan oleh BPS. Batasan BPS ini memang tidak diperuntukkan bagi usaha kecil secara umum, melainkan khusus bagi usaha kecil sector industri. Menurut BPS, yang dimaksud dengan industri kecil adalah usaha industri yang melibatkan tenaga kerja antara 5 sampai 19 orang. Sedangkan yang dimaksud dengan industri rumah tangga adalah usaha industri yang mempekerjakan kurang dari 5 orang.

Berdasarkan kelima batasan tersebut, dapat disaksikan betapa sangat beragamnya pengertian usaha kecil yang kini berlaku di Indonesia. Padahal, diluar pengertian tersebut, kini juga terdapat usaha kecil sebagaimana dirumuskan oleh UU No. 9/1995. menurut UU ini yang dimaksud dengan usaha kecil adalah:

- a. memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp 200 juta, tidak termasuk tanah dan bangunan tempatusaha atau
- b. memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp 1 milyar
- c. milik warga Negara Indonesia
- d. berdiri sendiri, bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau berafiliasi baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha menengah atau usaha menengah atau besar
- e. berbentuk usaha orang perorangan, badan usaha yang tidak berbadan hukum koperasi

Karakteristik Usaha Kecil

Menurut studi yang dilakukan oleh DD,Rairborn dari Universitas Bradley, usaha kecil memiliki karakter sebagai berikut :

1. Konsentrasi kepemilikan atau pengendalian operasional berada pada satu atau beberapa individu
2. anggota-anggota manajemen memiliki pengetahuan akuntansi yang terbatas
3. tidak adanya pemisahan fungsi-fungsi dalam operasional dan sistim akuntansi karena karyawan yang sedikit
4. pembuatan kebijakan yang tidak efesien dan efektif

Menurut SPAP no. 58 seksi 710 pengertian usaha kecil adalah perusahaan yang mempunyai alokasi sumber daya yang lebih sedikit ke akuntansi keuangan disbanding dengan bisnis besar karena mempertimbangkan sifat ekonomis jika harus mempekerjakan karyawan yang memiliki ketrampilan khusus bidang akuntansi. SPAP juga menunjukkan karakteristik bisnis kecil yaitu : adanya pemisahan tugas yang terbatas dan dominasi oleh manajemen senior atau pemilik terhadap semua aspek pokok bisnis.

Manajemen atau pemilik bisnis kecil yang secara aktif berpartisipasi dalam mengelola bisnis dapat mendominasi operasi satuan usaha dalam semua aspek pokok seperti struktur pengendalian intern dan pembuatan laporan keuangan. Keadaan tersebut dapat menguntungkan satuan usaha karena semacam itu dapat menutupi kelemahan dalam prosedur pengendalian intern. Kelemahan besar dengan adanya dominasi tersebut adalah jika manajemen mengesampingkan pengendalian intern. Hal ini terjadi karena mereka memiliki posisi untuk melakukan penyimpangan tersebut, sehingga dapat berpengaruh terhadap terjadinya salah saji material dalam laporan keuangan.

Adanya keterbatasan sumber daya karyawan ataupun pengetahuan akuntansi akan beakibat pada penyelenggaraan catatan tidak memadai, atau dilaksanakan secara formal . oleh karena itu terdapat resiko bahwa laporan keuangan akan tidak cermat atau tidak lengkap. Selain keterbatasan dalam pengetahuan akuntansi maka bisnis kecil menjadi tidak

praktis untuk mengadakan pemisahan tugas diantara individu yang berbeda seperti yang dapat dilakukan pada bisnis besar.

Rainborn menggambarkan situasi pengawasan perusahaan kecil sebagai berikut:

1. Pimpinan dan pegawainya memiliki pengetahuan atau pengalaman yang terbatas dibidang keuangan akuntansi.
2. tidak adanya pemisahan fungsi akibat sedikitnya jumlah pegawai.
3. prosedur dan system yang tidak didesain secara tepat.
4. Terlalu mudah menjamah dan memanfaatkan harta perusahaan oleh semua pegawai
5. Sistem pelaporan, analisa, perencanaan dan pengawasan yang sifatnya tidak resmi dan pelaksanaannya sangat tergantung dari gaya manajemen /pimpinan.

Masalah-Masalah Dalam Audit Usaha Kecil

Survei yang dilakukan ASB mengenai kesulitan –kesulitan yang dialami oleh auditor usaha kecil sebagai berikut:

1. Auditor bisnis kecil dibingungkan mengenai kegunaan dan persyaratan melakukan studi dan evaluasi pengendalian akuntansi internal. Mayoritas responden yang disurvei mengindikasikan bahwa mereka akan melakukan tes kepatuhan pengendalian, walupun pengendalian ini tidak direncanakan.
2. Pada sebagian besar lingkungan usaha kecil, para auditor tidak dibenarkan untuk menyandarkan kepada pengendalian intern akuntansi karena kurangnya pemisahan tugas dan potensi pelanggaran manajemen dalam bisnis kecil.

Menurut E. Hewis Bryan dan Robert W Rouse (1984) penetapan standar auditing pada bisnis kecil membuktikan adanya kesulitan bagi banyak akuntan public khususnya aspek independensi dan pengendalian intern. Audit bisnis kecil menunjukkan tantangan yang unik bagi praktisi sehubungan dengan standar independensi serta evaluasi pengendalian intern.

Dalam SPAP No. 58 seksi 750 dinyatakan bahwa masalah yang timbul dalam audit usaha kecil sehubungan dengan karakteristiknya adalah sebagai berikut :

1. pemisahan tugas yang terbatas
Adanya pengalokasian sumber daya yang lebih sedikit ke fungsi akuntansi keuangan disbanding dengan bisnis yang besar, mengakibatkan manajemen mempekerjakan karyawan yang tidak memiliki ketrampilan khusus dalam bidang akuntansi.
Bila sumber daya akuntansi terbatas, ada dua akibat yang timbul :
 - a. penyelenggara catatan tidak memadai atau dilaksanakan secara tidak formal.oleh karena itu terdapat resiko bahwa laporan keuangan akan tidak cermat atau tidak lengkap.
 - b. Karena manajer bisnis kecil umumnya meletakkan kepercayaanya lebih besar kepada auditor untuk membantunya dalam penyusunan catatan akuntansi dan laporan keuangan, maka ia dapat beranggapan keliru bahwa ia dapat melepaskan tanggung jawabnya dalam pelaporan keuangan yang cermat.

2. dominasi oleh manajemen senior atau pemilik

kelemahan terbesar dengan adanya dominasi ini adalah pengendalian intern dapat dikesampingkan oleh manajemen senior atau pemilik. Manajemen senior atau pemilik dapat memiliki kesempatan untuk mengesampingkan prosedur yang ditetapkan karena mereka memiliki posisi untuk itu. Dengan demikian resiko adanya kecurangan oleh manajemen menjadi lebih besar. Bila manajemen senior atau pemilik mendominasi operasi satuan usaha, mereka dapat menggunakan pengaruhnya sehingga mengakibatkan salah saji material dalam laporan keuangan.

Sedangkan menurut Michael j. page ada dua permasalahan penting yang dihadapi auditor *pertama*, ada skala ekonomis dalam auditing tidak dibutuhkan biaya yang dua kali lebih besar untuk melaksanakan audit satu perusahaan yang dua kali lebih besar dibanding lainnya. Hal ini akan relative lebih mahal melaksanakan prosedur audit yang sama terhadap perusahaan yang lebih kecil dibanding dengan perusahaan yang lebih besar. Alasan adanya skala ekonomis dapat bermacam-macam, tetapi alasan pentingnya adalah ukuran sample yang digunakan dalam pengujian statistic tidak tergantung dari ukuran populasi yang akan diambil sampelnya, dan bahwa ada elemen biaya tetap dalam banyak prosedur-prosedur audit (seperti pemeriksaan pemenuhan terhadap persyaratan yang ditetapkan dalam UU tentang perusahaan dan standar-standar akuntansi, perencanaan audit, dan peninjauan proses audit).

Kedua, audit akan lebih sulit dilakukan pada perusahaan kecil, karena mereka tidak memiliki atau membutuhkan sistim-sistim yang terperinci mengenai pengendalian internal yang dapat diandalkan ketika melaksanakan auditing terhadap perusahaan besar.

Kelihatanya ada tiga kemungkinan reaksi yang dapat muncul dari auditor atas permasalahan ini yaitu :

1. Ia dapat mengaudit perusahaan kecil dengan cara yang sama seperti yang dilakukan mengaudit perusahaan-perusahaan besar , dengan menyesuaikan prosedur seperlunya.

Memperlakukan perusahaan-perusahaan kecil sama seperti perusahaan besar memungkinkan seorang auditor menggunakan pandangan yang asli tentang audit, tetapi hal ini menyangkut penempatan beban yang sangat berat terhadap perusahaan yang bersangkutan. Para auditor seringkali mengekspresikan hal ini dengan mengatakan bahwa proses audit merupakan 'harga yang harus dibayar atas adanya pertanggung jawaban yang terbatas' (dan mengabaikan kenyataan bahwa perusahaan –perusahaan yang tidak berstatus PT diharuskan melaksanakan audit pula)

Dalam menyatakan bahwa perusahaan-perusahaan kecil harus diaudit dengan cara yang sama seperti yang dilaksanakan terhadap perusahaan besar bukan lantas seperti prosedur audit yang dijalankan harus serupa. Karena adanya sedikit fakta yang bisa ditemukan mengenai pelaksanaan pengendalian pada perusahaan kecil, dan karena adanya bahaya penolakan dari manajemen, maka para auditor cenderung untuk tidak mengandalkan

pada upaya pengendalian yang ada saja dan lebih banyak melakukan pengujian yang riil, tetapi tipe pengujian seperti ini juga digunakan pada proses audit bagi perusahaan-perusahaan besar.

2. Ia dapat memakai standar-standar audit yang berbeda dari data pendukung yang ada
Kemungkinan strategi kedua bagi auditor adalah dengan menggunakan standar-standar pembuktian yang lebih rendah atas opini yang diberikannya. Auditor mungkin mau memberikan opini yang benar dan wajar terhadap laporan keuangan perusahaan-perusahaan kecil dengan biaya yang lebih rendah, jika ia mau menyetujui tingkat ketidakakuratan relative lebih tinggi pada sejumlah laporan keuangan perusahaan-perusahaan kecil, misalnya jika ia ingin menggunakan batas tingkat kepercayaan yang lebih luas bagi angka-angka yang tercantum didalam laporan keuangan. Dua cara yang bisa digunakan auditor dalam membenarkan kondisi seperti itu adalah dengan melihat pada sifat dari 'pandangan yang benar dan wajar', dan terhadap sifat dari konsep yang dimiliki auditor mengenai 'materialitas'
3. Ia dapat merubah laporan hasil auditnya.
Pilihan lain bagi para auditor dalam mengaudit laporan keuangan perusahaan-perusahaan kecil adalah dengan menyelesaikan masalah auditnya. Pada pengamatan pertama, upaya pengkualifikasian atas laporan hasil audit tidak akan terlihat sebagai suatu jalan yang menarik untuk dilaksanakan, karena UU tentang perusahaan mengharuskan auditor untuk mengeluarkan suatu opini/pendapat. Akan terjadi penilaian profesional yang berat sebelah untuk melakukan upaya kualifikasi atas laporan audit dengan hemat untuk menjaga efektifitasnya, dan para klien pasti akan menolak upaya tersebut.

Dampak Karakteristik Bisnis Kecil Terhadap Audit

Pertimbangan Penugasan

Auditor mungkin menentukan bahwa tidak mungkin ia memperoleh bukti kompeten yang cukup untuk membentuk pendapatnya atas laporan keuangan karena kelemahan yang timbul dari karakteristik bisnis kecil, seperti tidak diselenggarakannya pencatatan. Dalam keadaan ini auditor dapat memutuskan untuk tidak menerima penugasan atau setelah menerima penugasan, menarik diri dari penugasan atau menyatakan tidak memberi pendapat.

Untuk kepentingan kedua belah pihak, baik auditor maupun klien, auditor harus mengirim surat penugasan audit sebelum dimulainya penugasan audit, untuk menghindari kesalahpahaman mengenai prosedur audit.

Prosedur dan Pertimbangan Audit

Karakteristik bisnis kecil juga berdampak terhadap pendekatan audit atas laporan keuangan. Dalam mengaudit bisnis kecil, sebagaimana halnya dalam semua audit, auditor memperoleh pemahaman atas bisnis dan system pencatatan satuan usaha serta pengolahan transaksi. Auditor menentukan kecukupan system tersebut sebagai dasar untuk penyusunan laporan keuangan. Dalam merencanakan dan melaksanakan auditnya, auditor

mempertimbangkan rancangan system akuntansi secara menyeluruh dan memperoleh pemahaman mengenai bagaimana system akuntansi tersebut mencerminkan transaksi satuan usaha. Auditor juga mempertimbangkan apakah bukti audit kompeten yang cukup dari system akuntansi dan dari pemeriksaannya atas laporan keuangan satuan usaha dapat diperoleh untuk menguatkan pendapatnya.

Dalam audit atas laporan keuangan bisnis kecil, tidak adanya pemisahan tugas dan kemungkinan dikesampingkannya pengendalian intern oleh manajemen senior atau pemilik umumnya menimbulkan kesulitan bagi auditor karena tidak adanya pengendalian atau tidak cukup bukti mengenai efektivitas pengendalian serta kelengkapan dan kecermatan catatan, atau secara keseluruhan resiko pengendalian tinggi. Kesulitan yang lebih khusus termasuk kemungkinan penyajian laba yang lebih rendah (dengan tidak mencatat atau salah mencatat penjualan) dan memasukkan biaya yang seharusnya digolongkan ke dalam biaya pribadi manajemen senior atau pemilik.

Dalam banyak situasi, auditor dapat mengambil kesimpulan untuk memberikan pendapat wajar tanpa pengecualian dengan cara memperoleh bukti audit dari perluasan prosedur substantive, seperti dengan melakukan pengujian rinci tambahan dan analisis biaya dan laba. Namun, dalam beberapa bisnis, seperti bisnis yang sebagian besar transaksinya merupakan transaksi kas dan yang tidak memiliki pola biaya dan laba, bukti yang tersedia mungkin tidak cukup untuk mendukung pendapat wajar tanpa pengecualian yang efektif, auditor sebaiknya membatasi prosedur auditnya pada prosedur yang bersifat substantif agar audit efisien.

Dalam audit atas laporan keuangan bisnis kecil, penting bagi auditor untuk mendapatkan representasi manajemen, karena bahaya kesalahpahaman mengenai peran dan tanggungjawab auditor dalam hubungannya dengan laporan keuangan. Audit perlu mengingatkan manajemen tentang tanggungjawabnya untuk menjamin kelengkapan dan kecermatan catatan akuntansi dan penjagaan keamanan aktiva satuan usaha. Meskipun demikian, auditor tidak dapat meletakkan kepercayaan hanya pada representasi manajemen untuk memperoleh keyakinan mengenai kelengkapan catatan akuntansi.

Dengan alasan tersebut diatas, auditor cenderung menentukan resiko pengendalian yang tinggi untuk bisnis kecil. Auditor harus membuat manajemen menyadari, pada waktu yang tepat, kelemahan signifikan dalam pengendalian intern yang diketahuinya dari audit yang dilakukan. Auditor tidak akan menguji semua pengendalian intern dioperasikan oleh manajemen, auditor harus pula menyatakan adanya kelemahan kepada manajemen sebatas yang yang diketahuinya sebagai hasil audit yang dilaksanakannya dilingkup audit. Rekomendasi perbaikan pengendalian intern juga dapat dibuat dalam komunikasi ini.

Kesimpulan

Ketidakteraturan pembukuan dan lemahnya system pengendalian intern merupakan permasalahan utama yang sering dihadapi oleh pengusaha kecil, begitu pula dengan para akuntan public yang melakukan kegiatan profesi pada sector usaha kecil.

Usaha kecil memiliki karakteristik sebagai berikut: konsentrasi kepemilikan atau pengendalian operasional berada pada satu beberapa individu, anggota-anggota manajemen memiliki pengetahuan akuntansi yang terbatas, tidak hanya pemisahan fungsi –fungsi dalam operasional dan system akuntansi karena jumlah karyawan yang sedikit serta pembuatan kebijakan yang tidak efisien dan efektif.

Kesulitan yang dialami auditor usaha kecil sehubungan dengan karakteristik usaha kecil itu adalah: pemisahan tugas yang terbatas, sehingga tidaklah mungkin bagi auditor untuk meletakkan kepercayaan pada struktur pengendalian intern untuk mendeteksi kekeliruan dan ketidakterbatasan dan adanya dominasi manajemen senior atau pemilik.

Dampak dari karakteristik ini terhadap audit usaha kecil adalah, pertama, pertimbangan penugasan dimana auditor mungkin merasa bahwa ia tidak mungkin memperoleh bukti audit kompeten yang cukup untuk membentuk pendapatnya atas laporan keuangan dan prosedur dan pertimbangan audit.

Daftar Pustaka

AICPA, 1979, *Compilation and Review of Financial Statement*.

APC (Auditing Practices Committee), 1979, *Small Companies: the need for audit*.

_____, 1980, *Analysis of Public Comment on small companies: the need for audit*.

Briston, R. J and Perks, R., 1977, "The External Auditor: his role and cost to Society", *Accountancy*, November 1977.

Davidson, I. H., 1980, "Small Companies- why a review is not the answer", *Accountancy*, March 1980.

Gemell, J., 1977, "Audit problems ahead with small companies", *Accountancy*, Juli 1977.

Page, M. J., 1984, "Will a new form of incorporation really aid small business?", *Accountancy*, April 1982.